

**STRATEGI MEMPERSEMPIT RUANG GERAK RENTENIR
MELALUI KELOMPOK MASYARAKAT BERBASIS MODAL
SOSIAL
(STUDI KASUS DI KAMPUNG RAHAYU, PURWOKERTO)**

Encep Saepudin dan Putri Dwi Cahyani

Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Abstrak

Rentenir menjadi sumber meminjam uang bagi kelompok masyarakat miskin, termasuk di Desa Karanglesem, Purwokerto, atau yang dikenal dengan Kampung Rahayu. Pinjaman tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan memenuhi gaya hidupnya, seperti memiliki televisi, telepon selular, dan motor. Guna mendapatkan uang untuk mencicil pinjaman itu, mereka memperolehnya dari hasil 'bekerja' sebagai pekerja jalanan, yaitu pengemis dan pengamen jalanan. Mereka mengerahkan anak-anaknya untuk turut bekerja dan melarangnya sekolah sehingga mereka terperangkap pada kemiskinan. Kemiskinan ini membuatnya ketergantungan pada rentenir. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketergantungan mereka pada rentenir bukan sekadar faktor ekonomi, namun pola pikir (*mindset*) yang hedonistik turut melanggengkan ketergantungannya pada rentenir. Karena itu, pola pelepasannya dari ketergantungan itu harus melibatkan banyak pihak dan bersatu dalam satu kelompok masyarakat. Kelompok ini bertugas memberikan pelatihan keterampilan, mengubah pola pikir, mengembalikan fungsi keluarga, serta memutus rantai rentenir.

Kata kunci : *Rentenir, Kelompok Masyarakat.*

Abstract

Money lenders is a source to borrow money for the poor, including in the village of Karanglesem, Purwokerto, otherwise known as Kampung Rahayu. The loans are applied to everyday needs and fulfilling lifestyle, such as cellular phones, a television, and a motorcycle. In order to get the money to repay the loan, they get it from the 'work' as street workers, are beggars and street singers. They involve their children to work together and forbade school so that they are trapped in poverty. This poverty makes the dependence on money lenders. The study found that their dependence on money lenders is not just economic, but the mindset hedonistic helped perpetuate on money lenders. Therefore, the release pattern of dependency that must involve many parties and unite in one group of people. The group is tasked with providing vocational training to change the mindset, restore the function of the family, as well as breaking the chain of money lenders.

Keywords : Money lender, group of people.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Praktek rentenir merupakan salah satu profesi paling tua karena mampu menembus sejarah peradaban manusia. Rentenir adalah meminjamkan uang dengan jumlah tertentu disertai dengan beban pinjaman yang disebut dengan bunga (*interest*), yang nominalnya seringkali melebihi batas kewajaran. Itulah yang menyebabkan setiap orang menolak keberadaannya karena membuatnya jatuh miskin, namun seringkali sulit menghindarinya saat posisi terdesak kebutuhan uang tuna cepat. Yessi Yoserizal mengatakan bahwa praktek rentenir terus melenggang dan bahkan mengalami perkembangan dari sisi jumlah pelaku maupun dana yang dipinjamkan kepada masyarakat.

Menurut Aldrin dan Tyas (2010), pandangan sinis masyarakat terhadap praktek rentenir tidak menyurutkan banyak orang untuk menekuninya. Adapun ciri prakteknya, menurut Drajat Tri Kartono (2004), adalah memakai manajemen pembukuan sederhana dan melayani pinjaman mulai dari Rp.5000. Korban rentenir di Kabupaten Banyumas terus berjatuhan, namun pemberantasannya belum juga menampakkan hasil yang optimal. Padahal upaya penanggulangannya dirintis sejak tahun 1895, yang ditandai dengan pendirian *De Poerwokertoshce Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi di Purwokerto) oleh Patih Purwokerto, Raden Aria Wirjaatmadja.

Berdasarkan berita Suara Merdeka (2015), warga Desa Tiparkidul memasang spanduk larangan praktek rentenir di lingkungan RT 1 RW 4 karena korban rentenir, yang sebelumnya memiliki aset cukup, kini menjadi kehilangan asetnya. Sejumlah korban rentenir meminjam uang pada lebih dari satu orang rentenir dengan nominal pinjaman sudah berlipat dari modal pinjaman. Kampung Rahayu di Purwokerto Selatan, yang lokasinya berdekatan dengan Taman Andhang Pangrenang di bekas terminal bis lama Purwokerto, menjadi terkenal sejak mencuatnya kasus Dewi Anggraeni.

Gadis cilik berusia 11 tahun ini harus bekerja keras, melebihi batas usianya, agar memperoleh uang minimal Rp.70.000 per hari. Sri Wati, orang tua tiri gadis cilik ini, yang memaksanya bekerja di persimpangan jalan di Jalan Jenderal Soedirman sebagai pengemis. Uang sebanyak itu diperuntukan mencicil utang pada rentenir Rp.50.000 dan uang belanja

kehidupannya Rp.20.000. Sri Wati menjadi orang tua tirinya sejak ibu kandung Dewi, Maryati, meninggal dunia, pasti marah bila setorannya kurang dari target.

Program pemerintah belum optimal dalam mengangkat mereka dari kemiskinan, yang merupakan akar persoalan sehingga mereka terjatuh rentan. Bupati Banyumas Ahmad Husein (Republika, 2015) mengatakan bahwa persoalan di Kampung Rahayu terbilang pelik karena masalahnya terletak pada sikap mental dari para orang tuanya, dimana mereka mengajarkan anak-anaknya bekerja menjadi pengemis. Bila sekadar menyekolahkan anak-anak, Banyumas memiliki program bantuan sekolah gratis bagi keluarga mampu. Hanya persoalannya adalah keluarga mereka menolak menyekolahkan anak-anaknya karena dinilai tidak menghasilkan uang. Ketua RT 04 RW 05, Rusmin (Republika, 2015), mengatakan bahwa program kerja RT sulit dilaksanakan karena keterbatasan kemampuan keuangan dan waktu dari para warga. Bagaimana mungkin menggelar suatu kegiatan, sementara untuk menutup kebutuhan keseharian mereka saja sudah kesulitan.

Berdasarkan dari urgensi latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian ini untuk mengkaji pendekatan rentan untuk mendapatkan dan mempertahankan nasabah di Kampung Rahayu, Banyumas dan mendapatkan model kelompok masyarakat (Pokmas) berbasis modal sosial yang dapat memberdayakan masyarakat di Kampung Rahayu, Banyumas.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dimulai dengan penggalan informasi langsung dari narasumber yang pernah terlibat dengan rentan dan kelompok masyarakat (Pokmas) melalui metode *Snow Balling*. Teknik pelaksanaannya adalah setelah syarat administratif penelitian terpenuhi, peneliti menghubungi tokoh masyarakat di Kampung Rahayu sebagai *key informant*, yang telah berpengalaman menghadapi langsung rentan dalam mendapatkan dan mempertahankan nasabah di permukiman.

Dari pengelola itu akan menghubungi mantan nasabah rentan dan pengurus Pokmas, yang dimaksud dalam Pokmas ini hanya istilah peneliti karena sebenarnya adalah paguyuban dengan penamaannya sesuai harapan para anggota. Perubahan selama ada di lapangan sangat dimungkinkan selaras dengan perkembangan permasalahan yang terjadi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer, sebagai data utama, diperoleh melalui wawancara mendalam antara peneliti dengan subyek yang diteliti yaitu nasabah rentenir, mantan nasabah rentenir, tokoh masyarakat. Data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah, buku, jurnal, artikel yang ada di internet yang terkait dengan permasalahan.

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu mengolah dan menganalisis data-data sehingga dapat memberikan pandangan umum mengenai praktek rentenir, solusi terbebas dari praktek rentenir, dan harapan nasabah rentenir dan mantan nasabah rentenir.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data BPS Tahun 2014, Kelurahan Karangklesem merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan. Areal seluas 1.375,31 hektar dihuni 14.177 jiwa, yang berkelompok dalam 5 dukuh, 13 rukun warga (RW), dan 64 rukun tetangga (RT). Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 7.039 laki-laki dan 7.138 perempuan. Jumlah rumah tangga sebanyak 3.475 jiwa. Angka penduduk 15 tahun ke atas menurut lapangan pekerjaan adalah sektor pertanian 488 orang, pertambangan dan penggalian 24 orang, industri 679 orang, listrik, gas, dan air 261 orang, konstruksi 133 orang, perdagangan 3.817 orang, angkutan dan komunikasi 982 orang, lembaga keuangan 441 orang, dan jasa-jasa 2.514 orang. Disini terdapat 8 unit usaha besar dengan 266 tenaga kerja, sebanyak 28 unit usaha kecil dengan 196 tenaga kerja, dan sebanyak 51 unit industri rumah tangga dengan 198 tenaga kerja. Terdapat 1 unit pasar, 172 toko/kios/warung, 37 restoran/warung makan, dan 8 hotel/losmen.

Angka penduduk 15 tahun keatas menurut pendidikan adalah tidak/belum tamat sekolah dasar (SD) 3.078 orang, tamat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) 1.623 orang, tamat sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) 1.899 orang, dan akademi/universitas 1.002 orang. Banyaknya murid sekolah dasar (SD) 1.389 orang dengan 45 guru dan bersekolah di 4 unit sekolah, madrasah ibtidaiyah (MI) 222 orang dengan 21 guru di 1 unit sekolah, SLTP 1.398 orang dengan 81 guru dan bersekolah di 1 unit sekolah, dan SLTA 2.125 orang dengan 102 guru dan bersekolah di 4 unit sekolah. Jumlah pemeluk agama Islam 12.864 orang dengan rumah ibadah sebanyak 24 masjid dan 91 musholla, dan khatolik 501 orang,

Kristen 423 orang, Budha 21 orang, dan Hindu 20 orang. Kampung Rahayu menempati area pada 1 RT dengan penghuni sekitar 200 kepala keluarga (KK), dimana 28 KK adalah warga menetap di rumah sendiri dan selebihnya adalah mengontrak rumah.

Sebutan lagi Kampung Rahayu adalah Kampung Dayak karena deretan rumah-rumah warga dibuat dari potongan-potongan triplek dan seng bekas dan migrasi masuk dan keluarnya warga terbilang tinggi. Mayoritas pekerjaan warganya adalah mengemis, mengamen, memulung, menyopet, menjajakan diri (pekerja seks), dan sebagainya.

Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas No 16 tahun 2015 mengenai larangan memberikan sesuatu pada pengemis dan pemidanaan terhadap pengemis dan pangamen. Setiap orang yang mengemis dan mengamen dipidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp 50 juta. Sanksi hukuman juga ditujukan pada setiap orang, lembaga atau badan hukum yang memberi uang dalam bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar dan anak jalanan diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp 20.000.000. Peraturan tersebut menuai protes dari para pekerja jalanan tersebut karena pendapatan langsung turun akibat masyarakat tidak mau lagi memberikan donasinya pada mereka. Padahal, mereka mengakui tidak mempunyai keterampilan dan hanya mengandalkan belas kasihan dari pengguna jalan. Uang diperoleh untuk biaya kehidupan keseharian dan melunasi pinjamannya pada rentenir.

Permasalahan korban rentenir di Kampung Rahayu memang cukup kompleks karena ini bukan persoalan kemiskinan belaka, melainkan pola pikir (*mindset*) pelakunya. Memang benar bila sekadar kebutuhan uang, program pemerintah dan bantuan masyarakat, baik perorangan maupun yang terkumpulkan dari lembaga sosial, sudah cukup membantu kebutuhan hidup minimal mereka. Namun, persoalannya pada pola pikir yang tertanam bahwa hanya dengan berdiri di pinggir jalan dengan menengadahkan tangan sudah mendapatkan uang yang cukup besar. Bahkan pendapatannya, pada hari-hari tertentu, dapat mengalahkan gaji pegawai. Hal ini yang menyebabkan mereka menolak pindah pada pekerjaan lain, seperti buruh pabrik, pekerja bangunan, atau sejenisnya karena dinilai memberikan pendapatan yang kecil. Karena itu, permasalahan ini harus diselesaikan secara holistik dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Berdasarkan temuan lapangan diketahui bahwa korban rentenir sekitar 80 korban rentenir mencapai Rp.500.000.000, yang berasal dari utang skim arisan, skim sewa, pembelian barang secara kredit, dan wisata gratis. Mengenai jumlah korban rentenir pun tidak mudah memperoleh angka pastinya karena ketertutupan diri mereka. Mereka sulit melepaskan diri dari perangkap utang karena pendapatannya dari hasil mengamen, mengemis, memulung, menyopet, dan menjajakan diri (pekerja seks) tidak cukup.

Seringkali mereka harus menutup cicilannya dengan utang baru karena penghasilannya kurang sehingga utang pun terus bertambah besar nominalnya. Bila mereka memperoleh penghasilan yang cukup besar, justru dipergunakan bukan alokasi yang sebagaimana mestinya. Mereka menjajakannya untuk mabuk-mabukan, bermain *game* online, dan aktivitas lain yang menghambur-hamburkan uang hingga ludes. Seakan tiada kepikiran bagi mereka untuk melunasi utangnya.

Dalam keadaan tekanan hidup yang cukup berat ini menyebabkan semangatnya untuk mengubah nasib menjadi lebih baik padam. Mereka ‘menikmati’ kondisi ini dengan segala konsekuensinya. Hal ini membentuk cara pandang mereka terhadap orang-orang disekitar, bahkan dengan keluarga sendiri, dan lingkungan tanpa empati dan simpati. Kekerasan menjadi bagian keseharian kehidupan mereka.

Penelitian menemukan ini bahwa hubungan orang tua dan anak bukan lagi hubungan kasih sayang, melainkan bagaimana orang tua dapat memberdayakan anak-anaknya agar menghasilkan uang. Utang mereka tidak akan berakhir ketika kematian menjemput. Kasus Dewi Anggraeni, yang muncul ke publik karena pemberitaan media massa hingga nasional, merupakan fakta yang tidak terbantahkan utang orang tua diwariskan pada anak keturunannya.

Para rentenir untuk menjerat korban, rentenir menawarkan dua jenis utang, yaitu skim arisan dan skim sewa. Skim arisan adalah korban menerima pinjaman dalam jumlah tertentu atau sesuai pengajuan korban, misalkan Rp.1.000.000 dan harus dicicil sebesar Rp.50.000 per hari selama 30 hari. Skim sewa adalah korban menerima utang sebesar Rp.1.000.000. Korban harus menyicil sebesar Rp.10.000 per hari dan ini yang dinamakan utang sewa. Cicilan sewa ini akan berakhir bila korban dapat melunasi tunai utangnya sebesar Rp.1.000.000. Berapa pun utang yang diajukan korban,

rentenir akan memotong 10% dari nominal utang sehingga korban menerimanya tidak utuh.

Sebagai ilustrasi, ketika mereka mengajukan utang Rp.1.000.000, maka yang diterima hanya Rp.900.000 karena sudah dipotong biaya administrasi sebesar Rp.100.000. Ini asumsi utang dalam bentuk tunai. Padahal rentenir punya layanan utang barang, yaitu memenuhi pembelian barang seperti telepon genggam, televisi, motor, dan sebagainya. Prosedur pembayaran mirip dengan skim arisan dan sewa.

Modus lain yang merupakan perangkap yang tergolong unik adalah rentenir menyediakan bis dan tiket gratis masuk taman wisata air di Purbalingga. Orang tua bersama anak-anak tentu tergiur untuk ikut wisata gratis ini meski tidak mempunyai uang karena berpikiran bahwa bis dan tiket ditanggung rentenir. Ketika mereka tiba di tempat wisata air, anak-anak mulai merengek minta jajan atau menjajal permainan yang berbayar. Disini rentenir mulai memasang perangkapnya dengan menawarkan utang baru, sebesar nominal tertentu, misalkan Rp.200.000. Korban menerima tawaran utang itu dengan tanpa berpikir panjang karena yang terpenting adalah anak-anak tidak merengek atau menangis karena permintaannya tidak terkabulkan. Akhirnya, utang baru pun bertambah, padahal utang yang di rumah pun belum lunas.

Berdasarkan penelitian ditemukan fakta bahwa penyebab korban sulit melepaskan diri dari rentenir dikarenakan : (1) pola pikir konsumtif, (2) pesimis terhadap masa depan, (3) ketidakpedulian pada pendidikan formal, (4) lapangan pekerjaan informal (pengemis, pengamen, kriminal), (5) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), (6) anak-anak tanpa bimbingan orangtua atau dewasa dan dibiarkan hidup tanpa orientasi.

Merujuk Robby Djohan (2007) dikatakan bahwa modal sosial memiliki tujuh unsur penopang yang menjadi ciri khasnya, yaitu partisipasi sosial (*social participation*), timbal balik (*reciprocity*), saling mempercayai (*trust*), toleransi atau penerimaan atas keragaman (*acceptance of diversity*), perasaan berharga dan mampu berkontribusi (*sense of efficacy*), norma dan nilai, dan kerjasama (*cooperation*). Dengan merujuk pada tujuh unsur penopang ini akan memudahkan penelitian ini dalam mengurai atau membahas permasalahan yang berada di tengah Kampung Rahayu.

Guna mengupas permasalahan di Kampung Rahayu, penelitian ini

memakai pendekatan upaya yang diinisiasi masyarakat dalam mengubah kondisi sekarang menjadi lebih baik di masa depan. Kelompok masyarakat (Pokmas) yang berdiri atas inisiatif masyarakat merupakan salah satu indikator keinginan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan pendekatan ini, maka Yayasan Sri Rahayu merupakan obyek penelitian agar mengetahui sejauhmana masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya. Yayasan ini melayani : (1) TPQ (taman pendidikan qur'an), taman bermain (TBM), dan majelis taklim, (2) Pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) dan sekolah luar biasa (SLB), (3) kejar paket, (4) kelompok usaha bersama (Kube), (5) wakaf tanah pendidikan.

Layanan ini disediakan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Anak-anak yang selayaknya menerima pendidikan usia dini sudah dapat mengaksesnya disini. Bagi orang dewasa yang berkeinginan mendapatkan pendidikan formal yang layak, dapat bergabung pada kelompok belajar paket A, B, dan C. Sedangkan bagi yang ingin meningkatkan pendapatannya disediakan kelompok bersama usaha. Dalam memutuskan rantai perangkat rentenir, Yayasan Sri Rahayu menawarkan tiga jalan keluar, sebagai berikut :

Pertama, relokasi warga Kampung Rahayu ke daerah baru. Ini membutuhkan dana besar karena harus membebaskan lahan untuk permukiman, mendirikan bangunan beserta sarana dan prasarananya. Selama menempati daerah baru harus dipantau dengan maksimal agar mereka tidak berhubunga lagi dengan rentenir.

Kedua, melunasi utang-utang warga yang menjadi korban rentenir. Tidak ada data akurat karena transaksi utang tidak mempergunakan administrasi yang baik sehingga sulit dilacak kebenaran dari suatu nominal utang. Yayasan Sri Rahayu memperkirakan total nominal utang sekitar Rp.500.000.000, yang berasal dari sekitar 80 warga yang meminjam utang melalui skim arisan, sewa, dan pembelian barang secara kredit. Bila utang itu dilunasi, maka berikutnya adalah, apakah pemerintah memiliki anggaran sebesar itu?. pakah korban rentenir akan sadar sehingga tidak berutang kembali pada rentenir?.

Ketiga, Mengubah pola pikir warga melalui sebuah kelompok sosial (pokmas) lewat berbagai kegiatan seperti pertemuan rutin dan penyiptaan lapangan kerja. Dari ketiga solusi yang ditawarkan ini, yang mendekati

pemecahaan realistis adalah pada pilihan optimalisasi warga melalui Pokmas. Sebab model penguraian masalah ini membutuhkan anggaran yang terjangkau, tetapi hasil yang diperoleh lebih efektif.

Penelitian mendapatkan fakta bahwa solusi ini pun bukan perkara mudah karena tantangannya cukup besar karena kesediaan hadir dalam pertemuan sangat rendah. Rendahnya kehadiran mereka karena takut ancaman rentenir, keperluan hidup minimalnya dapat terpenuhi melalui utang, serta pendapatannya dapat terpenuhi dengan cara mengemis dan mengamen. Namun demikian, pemberlakuan peraturan daerah mengenai larangan pemberian sadaqah pada pengemis, pengamen, dan golongannya sedikitnya mengubah pola pikir mereka untuk memperbaiki kesejahteraannya melalui cara-cara yang bukan mengandalkan pekerjaan jalanan. Sejumlah pekerja jalanan sudah rajin mendatangi sekretariat yayasan untuk membekali diri mereka dengan ilmu dan pengetahuan, serta keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minatnya.

Penelitian menemukan fakta bahwa sudah sekitar 30 orang yang meluangkan waktunya untuk hadir pada pertemuan atau perkumpulan yang diselenggarakan yayasan. Jumlah tersebut masih mungkin bertambah dikemudian hari karena jumlah korban rentenir diperkirakan masih banyak. Diperkirakan mereka belum bersedia bergabung karena menilai pertemuan itu hanya membuang waktu karena tidak menghasilkan uang tunai. Faktor lain yang menghalangi langkah mereka untuk hadir dalam pertemuan adalah ketakutan tanpa alasan. Niat baik mereka seringkali dicemooh tetangga atau orang-orang terdekatnya.

Ketakutan lain, menurut Musofa, diduga ancaman dari rentenir karena kurang menyukai perkumpulan ini. Hanya orang-orang yang berani dan bernyali besar bersedia menghadiri pertemuan yang digagas Yayasan Sri Rahayu. Dalam pertemuan dibahas akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak dan keluarga karena dengan pendidikan akan mengangkat derajat mereka menjadi lebih baik, pendidikan formal memudahkan akses mereka pada lapangan kerja formal, yang akan memberikan penghasilan lebih memadai dari sebelumnya.

Yayasan memainkan peran bagaimana mengubah pola pikir anggota untuk meninggalkan pekerjaan mereka yang sekarang, yaitu mengemis, mengamen, menyopet, dan menjajakan diri. Tentunya perubahan pola pikir diiringi dengan pembukaan lapangan kerja yang memadai. Kini

yayasan menerima bantuan modal kerja dari Baznas Banyumas untuk membuka usaha perkayuan. Dana ini dibelanjakan mesin serut kayu, mesin creck, dan mesin profil. Usaha perkayuan ini mempekerjakan 4 orang.

Untuk tukang kayu masih merekrut tenaga dari luar Kampung Rahayu dan posisinya masih sebagai kenek atau pembantu tukang kayu. Sedangkan anak-anak mendapatkan pendidikan memadai melalui kelompok belajar. Dalam kelompok ini, mereka belajar memenuhi kebutuhan sendiri melalui keteladanan dan kepahaman, memahami lingkungan baik sehingga dapat membentuk karakter yang baik pula, memahami arti disiplin, kemandirian, keteladanan, dan mengenal agamanya, Islam, dengan baik.

Program kerja Yayasan Sri Rahayu selaras dengan program kerja Pemerintah Kabupaten Banyumas, sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018. Dalam peraturan ini diterangkan mengenai kebijakan umum Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018.

Dalam kebijakan umum yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat diantaranya melalui akses pendidikan, dimana arahnya adalah meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma/nilai kehidupan masyarakat lokal dan tanpa diskriminasi. Beberapa program pendidikan, melalui beasiswa dan subsidi biaya pendidikan, agar masyarakat tidak mampu dan berprestasi mendapatkan pendidikan yang layak, murah, dan berkualitas.

Program pendidikan yang digulirkan diantaranya adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Program Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan, Program Pendidikan Luar Biasa, dan Program Pendidikan Berkelanjutan.

Kelompok usaha bersama yang diselenggarakan Yayasan Sri Rahayu dapat dikaitkan dengan program pemberdayaan masyarakat dapat

dikaitkan dengan program peningkatan dan pengembangan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah. Adapun program-programnya adalah Program Penciptaan Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Guna menciptakan daerah yang lebih layak dan nyaman bagi warganya, yang selama ini Kampung Rahayu dikenal sebagai kawasan kumuh, dapat dikaitkan dengan program menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan, melalui program-program diantaranya Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Anak Terlantar, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Program-program Pemerintah Kabupaten Banyumas, dimana programnya sudah ada dan ketersediaan anggaran cukup memadai, selayaknya menyasar pula pada Kampung Rahayu. Tentunya para pemangku kepentingan dapat melakukan pendekatan agar Kampung Rahayu menjadi salah satu wilayah yang menjadi bagian program kerja Pemerintah Kabupaten Banyumas.

D. KESIMPULAN

Eksistensi praktek rentenir tidak lepas dari pola pikir (*mindset*) korban rentenir yang merasa tercukupi kebutuhan hidupnya dari pinjaman rentenir. Pembayaran utangnya dapat tertutupi dari pendapatannya sebagai pekerja jalanan, yaitu mengemis dan mengamen.

Bila pendapatannya masih kurang, maka mereka mengerahkan anak-anaknya untuk turut menjadi pengemis dan pengamen dan uang yang diperolehnya disetorkan pada orang tuanya. Hal ini menyebabkan hubungan orang tua dengan anak-anaknya bukan lagi hubungan keluarga, melainkan atasan dan bawahan.

Kehadiran Yayasan Sri Rahayu untuk mengubah pola pikir mereka cukup membantu peralihan pekerjaan dari pekerja jalanan menjadi pekerja yang pantas, seperti tukang kayu, penyanyi panggung hiburan, pedagang, serta memberikan pendidikan minimal pada anak-anak akan dapat memutus rantai ketergantungan mereka pada rentenir. Hal ini perlu diupayakan secara berkelanjutan karena ketergantungan mereka pada rentenir bukan sekadar motif ekonomi, melainkan pola pikir.

DAFTAR PUSTAKA

- Criana, Sjahandari. 2013. Makna Sistem Tanggung Renteng bagi Terjadinya Perubahan Perilaku Ekonomi Anggota Kelompok Pengusaha PedagangKecil (KPPK) di Koperasi Wanita Serba Usaha“Setia Budi Wanita” Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Humaniora* Volume 1, Nomor 3, September 2013, hal. 265-273.
- Dimyati, Khudzaifah. 1997. *Profil Praktik Pelepas Uang (Rentenir) dalam Masyarakat Transisi : Studi Kasus di Kartasura Kabupaten Sukaharjo*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Djohan, Robby. 2007. *Lead to Togeterness*. Fund Asia Education. Jakarta
- Khumadi. 2011. Peran Organisasi Keagamaan dalam Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Perempuan Berbasis Modal Sosial. *Muwâzâh*, Vol. 3, No. 1, Juli 2011.
- Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Priyadi, Sugeng. 2008. Orientasi Nilai Budaya Banyumas Antara Masyarakat Tradisional dan Modern. *Jurnal Humaniora* Volume 20 No. 2 Juni 2008 Halaman 158-167.
- Yessi, Yoserizal. Hubungan Sosial Antara Rentenir dan Nasabah (Suatu Studi Tentang Rentenir).
- Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018.